

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib, 2014, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Efendi, Bachtiar, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Bandung: Alumni.
- Harahap, Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya – Jilid 1Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan.
- HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- HS, H. Salim, 2015, *Teknik Pembuatan AKta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hutagalung, Arie S., 2001, *Asas-Asas Hukum Agraria*, Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Ismanto, Pandu, 2009, *Tanah dan PPAT*, Bandung: Refika Aditama.

- Kansil, C.S.T., 1995, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notaris dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Lubis, Muhammad Yamin dan Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, Muhammad Yamin, 2003, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1990, *Hukum Perikatan*, cetakan kedua, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, 2005, *Jual Beli*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parlindungan, A.P., 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Perangin, Effendi, 1991, *Hukum Agraria Di Indonesia (suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum)*, cetakan ketiga, Jakarta: Rajawali.
- Perangin, Effendi, 1994, *Praktik Jual Beli Tanah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prajitno, A. A. Andi, 2016, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa PPAT*, edisi Revisi, Surabaya: CV Perwira Media Nusantara.

- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung.
- Ridwan, Muhammad, 2010, *Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Telah Bersertifikat*, Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Setiawan, Yudhi, 2009, *Instrumen Hukum Campuran (Gemenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sibarani, Bachtiar, 2011 *Asas-Asas Pendaftaran Hak Atas Tanah*, Surabaya: Ilmu Pustaka.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta: UI Press.
- Subekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugono, Bambang, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukisno, Djoko, 2008, Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Mimbar Hukum vol. 20 Nomor 1.
- Sutedi, Adrian, 2013, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan, 2002, *Jual Beli*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

C. Makalah, Jurnal

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2 No. 1,
Agustus 2013.